BAB II
KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN
WARGA NEGARA INDONESIA

A. KEWARGANEGARAAN INDONESIA

Sebagaimana yang penulis kemukakan sebelumnya salah satu teori yang digunakan adalah teori kewarganegaraan. Bahwa negara tidak pernah terlepas dari adanya Warga Negara, tanpa rakyat suatu negara tidak akan terbentuk. Selanjutnya Pasal 15 *Declaration Universal of Human Rights* yang menyatakan :

1. Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.
2. Tidak seorangpun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.¹

Artinya bahwa status kewarganegaraan tak terlepas dari seorang warga dan negara yang saling berkaitan satu sama lain, kebebasan dalam memilih kewarganegaraan dan jaminan terhadap kewarganegaraan telah tertuang didalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia. Dalam teori kedaulatan rakyat yang dikemukakan oleh JJ. Rosseau, pembentukan negara disebabkan oleh adanya kontrak sosial atau kesepakatan masyarakat. Seperti yang dikatakan Bierens de Haan, negara adalah institusi manusia, orang membuat negara dan orang-orang yang membentuk negara itu adalah makhluk individu (*Edelwelzen*) dan juga makhluk sosial (*Gemeenschapswezen*). Masyarakat itu

¹ Pasal 15 *Declaration Universal of Human Rights*.

sendiri secara alami mengandung keinginan untuk berorganisasi, yang muncul dari dorongan batin. Negara adalah bentuk organisasi dari suatu masyarakat, yaitu suatu masyarakat yang terdiri atas bangsa-bangsa, walaupun masyarakat itu terbagi-bagi menjadi kelompok-kelompok, negara merupakan satu kesatuan yang utuh (*eedidee vertegenwoordigt*).²

Selanjutnya, mengenai hubungan antara rakyat dan negara, RG. Kartasapoetra mengatakan bahwa selain wilayah dan unsur pemerintahan, rakyat merupakan salah satu unsur pembentuk negara. Suatu negara tidak terbentuk tanpa adanya rakyat, walaupun memiliki wilayah yang pasti dan pemerintahan yang berdaulat, demikian pula jika ada masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu tetapi tidak memiliki pemerintahan sendiri yang berdaulat baik secara internal maupun eksternal, maka negara itu jelas tidak terbentuk.³

Kedua pendapat ini menyiratkan bagi kita bahwa antara negara dan warga negara ada dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Warga negara adalah orang-orang asli bangsa Indonesia dan orang-orang dari bangsa lain yang diakui sebagai warga negara menurut undang-undang menurut Pasal 26 ayat (1) UUD 1945. Pernyataan seperti di atas menegaskan bahwa orang pribumi dengan sendirinya adalah warga negara, sedangkan orang-orang dari

² Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", Disertasi, Pascasarjana UI, Jakarta, 1990. Hal 53-54.

³ RG. Kartasapoetra, 1987, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Bina Aksara, Jakarta, Hal. 21.

bangsa lain untuk menjadi warga negara Indonesia harus disahkan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Status kewarganegaraan penting bagi setiap orang untuk memastikan secara legal dan faktual statusnya sebagai badan hukum yang berhak memikul hak dan kewajiban hukum tersebut. Dalam hubungan hukum internasional, status kewarganegaraan dapat menjadi cara bagi setiap warga negara untuk menikmati manfaat dari keberadaan hukum.

Internasional AW Bradley dan K.D. Ewing mengatakan kewarganegaraan dan status kewarganegaraan mengikat seseorang dengan orang lain dalam hubungan.⁴ MacIver juga mengatakan bahwa masalah kewarganegaraan (*citizenship*) merupakan masalah nyata bagi seseorang di suatu negara, karena hak dan tanggung jawab bayi terikat dengan status kewarganegaraan.⁵ Bahkan status kewarganegaraan seseorang juga menentukan ketundukan mereka terhadap yurisdiksi suatu negara.⁶

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 menambahkan dua asas lagi, yaitu asas kewarganegaraan tunggal dan asas dwikewarganegaraan, yang dibatasi sampai usia 18 tahun dan setelah itu anak harus menentukan pilihannya. Secara norma, Indonesia sebenarnya menganut kewarganegaraan tunggal (*apatride*) dan bukan kewarganegaraan ganda (*bipatride*). Warga negara hanya boleh memiliki satu identitas kewarganegaraan. Akan tetapi, untuk kepentingan kebutuhan anak dari perkawinan campuran, prinsip

⁴*Ibid.*, Hal. 5.

⁵ R.M. MacIver, *The Modern State*, London: Oxford University Press, 150, Hal 465.

⁶*Ibid.*, Hal. 482.

kewarganegaraan ganda terbatas juga dianut. Tujuan dari kewarganegaraan ganda terbatas adalah bahwa seorang anak sampai dengan usia 18 tahun dapat memiliki dua kewarganegaraan sesuai dengan identitas nasional ayah dan ibunya, atau jika anak telah mencapai usia 18 tahun, anak harus memilih salah satu dari dua kewarganegaraan, yaitu kebangsaan ayah atau ibu.

Indonesia menganut asas naturalisasi, yaitu pemberian kewarganegaraan kepada orang asing. Secara umum, negara memiliki dua sikap kebijakan mengenai kewarganegaraan terkait naturalisasi, yaitu negara imigrasi dan negara non-imigrasi. Negara-negara imigrasi biasanya dipilih oleh negara-negara dengan populasi kecil. Kewarganegaraan dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan penduduk sehingga negara mengizinkan orang asing datang ke negara tersebut untuk memperoleh kewarganegaraan. Umumnya negara-negara tersebut juga menerapkan asas *ius soli (law of the soil)*, yaitu kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Sedangkan negara non-imigrasi dipilih dari negara-negara yang sudah memiliki jumlah penduduk yang besar dan padat. Kalaupun naturalisasi dilakukan, itu karena orang tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan negara.

Menurut pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah penduduk asli Indonesia dan orang-orang dari kebangsaan lain yang disahkan sebagai warga negara oleh undang-undang. Ketentuan semacam ini pada hakikatnya merupakan salinan dari ketentuan Pasal 26 ayat 1 UUD 1945 yang masih bersifat diskriminatif. Pasal 2 menyatakan bahwa “Bangsa Indonesia

Asli” adalah warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah secara sukarela memperoleh kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri atau yang biasa disebut *Original born citizen*.

Dari segi teori hukum, pengertian “bangsa asli Indonesia” adalah langkah yang kurang tepat karena pemahaman ini sebenarnya merupakan asas yang digunakan di seluruh isi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Oleh karena itu sebaiknya definisi tersebut dirumuskan dan dimasukkan dalam Pasal 2 atau Pasal 1 Ketentuan Umum.

Adapun asas-asas kewarganegaraan menurut undang-undang kewarganegaraan republik Indonesia :

1. Asas *Ius Soli*, ialah bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut tempat kelahirannya. Asas *ius soli* dapat juga disebut dengan asas daerah kelahiran. Menurut asas ini kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat dimana dia lahir, misalkan seseorang yang lahir di negara yang menganut asas *ius soli* akan menjadi warga negara di negara tempat kelahirannya itu.
2. Asas *Ius Sanguinis*, ialah bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut keturunan. Asas *ius sanguinis* juga dapat juga disebut dengan asas darah. Menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh garis keturunan orang yang bersangkutan. Seseorang mendapatkan kewarganegaraan sesuai dengan warganegara orang tuanya.⁷

⁷Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019, Hal. 386.

3. Asas Kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagu setiap orang;
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Meliputi sebagai berikut :
 - a. Asas kepentingan nasional, asas yang menyatakan bahwa ketentuan kewarganegaraan mendahulukan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad menegakkan kedaulatan yang memiliki cita-cita.
 - b. Asas perlindungan maksimum, asas yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam segala keadaan.
 - c. Asas persamaan dimuka hukum dan pemerintahan, asas yang menyatakan bahwa setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan.
 - d. Asas kebenaran substansif, asas bahwa prosedur kewarganegaraan tidak hanya bersifat administratif, tetapi disertai dengan persyaratan permohonan yang substantif dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - e. Asas non diskriminatif, prinsip bahwa perlakuan dalam segala hal yang mempengaruhi warga negara tidak boleh dibedakan atas dasar ras, kelompok etnis atau jenis kelamin.
 - f. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip yang harus menjamin, melindungi dan menghormati hak

asasi manusia, dan khususnya hak warga negara, dalam segala hal yang mempengaruhi warga negara.

- g. Asas keterbukaan, prinsip bahwa dalam segala hal yang menyangkut warga negara ini harus dilakukan secara terbuka.
- h. Asas publisitas, asas bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia agar setiap orang mengetahuinya.

B. WARGA NEGARA INDONESIA

Warga negara Indonesia adalah orang yang secara sah diakui sebagai warga negara Republik Indonesia, memiliki Izin Tinggal (KTP) dan memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada saat berumur 17 tahun dan terdaftar pada instansi pemerintah berdasarkan Kabupaten/Provinsi tempat tinggalnya terdaftar sebagai penduduk/warga negara. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menegaskan bahwa warga negara Indonesia adalah:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik IndonesiaI dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku menjadi Warga Negara Indonesia.

- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia.
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga negara asing.
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan Ibu seorang Warga Negara Indonesia.
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayah meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia.
- g. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia.
- h. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuannya itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan diwilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.

- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- l. Anak yang dilahirkan diluar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
- m. Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia.

Selain itu, diakui pula sebagai Warga Negara Indonesia bagi :

- 1. Anak WNI yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing.
- 2. Anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan.
- 3. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
- 4. Anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.

Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut :

1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
2. Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia.

Selanjutnya, warga negara juga bisa kehilangan status warga negaranya apabila melakukan hal-hal tertentu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia bahwa:

Warga negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.
3. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.
4. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing.
5. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing.
6. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara.
7. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor asing.

8. Bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia selama 5 tahun dan terus-menerus bukan dalam rangka dinas.

Selain itu, hak dan kewajiban merupakan hal yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara seimbang. Hak adalah segala sesuatu yang wajar dan mutlak bagi setiap orang, sedangkan kewajiban adalah suatu keharusan bagi individu untuk menjalankan perannya sebagai warga negara dan untuk memperoleh pengakuan hak sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.

Hak dan kewajiban warga negara dihasilkan dari hubungan antara warga negara dan negara. Hubungan antara warga negara dan negara dapat dilihat dari perspektif hukum, politik, moral dan budaya. Dari sudut pandang hukum, didasarkan pada konsep bahwa warga negara adalah semua orang yang terhubung secara hukum dengan suatu negara. Hubungan hukum dapat dibedakan menjadi (a) hubungan hukum yang sederajat dan tidak sederajat dan (b) hubungan timbal balik dan tidak sederajat.⁸

Bentuk dan hakikat hubungan antara warga negara dan negara Indonesia selanjutnya diabadikan dalam UUD 1945 sebagai dasar hukum negara. UUD 1945 tidak hanya menjadi dasar hukum negara, tetapi juga memuat nilai-nilai nenek moyang bangsa, cita-cita bernegara, termasuk visi negara dan rakyatnya. Oleh karena itu, dalam negara Indonesia yang

⁸ Winarto. *Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis menuju Yuridis*. Alfabeta.2009. Bandung. Hal 87.

demokratis berdasarkan negara hukum, model hubungan antara negara dan warga negaranya harus didasarkan pada hubungan hukum timbal balik dengan persamaan hak. Sedangkan Pasal 26 sampai dengan 34 UUD 1945 menetapkan status warga negara, kedudukan hukum warga negara dalam negara, hak dan kewajiban warga negara, serta hak dan kewajibannya.

Kemudian, kewarganegaraan Indonesia memiliki 2 (dua) sumber hukum. Pertama adalah sumber formil, diantaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan peraturan pelaksanaannya, perjanjian-perjanjian dan sebagainya. Kedua sumber hukum materil, diantaranya adalah asas hukum (*rechtsbegiselen*).

Berkaitan dengan asas kewarganegaraan tersebut. Penjelasan umum Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2006, menegaskan bahwa asas sebagai berikut :⁹

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan negara kelahiran.
2. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara kelahirannya. Yang dikenakan terbatas pada anak menurut ketentuan undang-undang ini.

⁹ *Ibid*

3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menetapkan kewarganegaraan ganda bagi anak menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁰

Selain asas-asas umum sebagaimana diatas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan undang-undang kewarganegaraan Indonesia:

1. Asas kepentingan sosial, adalah prinsip bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad untuk menegakkan kedaulatan sebagai negara kesatuan dengan yang memiliki cita-cita.
2. Asas perlindungan maksimum, asas yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun.
3. Asas persamaan di depan hukum dan pemerintahan, asas bahwa setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substansif, asas yang menentukan bahwa prosedur pewarganegaraan tidak hanya bersifat administratif tetapi disertai substansi dan syarat permohonan yang dapat dipertanggung jawabkan.

¹⁰ Widodo Ekatjahjana, *Hukum Kewarganegaraan*. Citra Aditya Bhakti. 2001. Bandung. Hal 33.

5. Asas non diskriminatif, asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan Warga Negara atas dasar SARA dan golongan serta gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan Warga Negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas keterbukaan, asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan Warga Negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas, asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.